



Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong

My Ismail

Universitas Musamus

Nurkholis Syukron

Universitas Musamus

Adi Maulana Rachman

Universitas Musamus

Alamat: Kampus Jln. Kamizaun, Mopah Lama, Merauke

Korespondensi penulis: Adi.maulana@unmus.ac.id

Abstract. Maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi masyarakat. Salah satu penyebab utama kerentanan masyarakat terhadap praktik ini adalah rendahnya literasi finansial, terutama pemahaman tentang ciri-ciri investasi legal dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya advokasi kebijakan literasi finansial sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik penipuan investasi bodong. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, dengan meninjau program literasi finansial yang telah ada, tantangan implementasinya, serta peran sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi finansial yang baik tidak hanya membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi penawaran investasi. Selain itu, advokasi kebijakan yang efektif membutuhkan integrasi program literasi finansial ke dalam kurikulum pendidikan, kampanye kesadaran publik, dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik investasi ilegal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa advokasi kebijakan literasi finansial memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif investasi bodong. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan, peningkatan akses informasi, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas investasi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan terlindungi dari risiko penipuan investasi.

Keywords: Advokasi Kebijakan, Literasi Finansial, Investasi Bodong.

Abstrak. Maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi masyarakat. Salah satu penyebab utama kerentanan masyarakat terhadap praktik ini adalah rendahnya literasi finansial, terutama pemahaman tentang ciri-ciri investasi legal dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya advokasi kebijakan literasi finansial sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik penipuan investasi bodong. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, dengan meninjau program literasi finansial yang telah ada, tantangan implementasinya, serta

Received September 20, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Januari 2, 2025

*Corresponding author, e-mail address

peran sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi finansial yang baik tidak hanya membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi penawaran investasi. Selain itu, advokasi kebijakan yang efektif membutuhkan integrasi program literasi finansial ke dalam kurikulum pendidikan, kampanye kesadaran publik, dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik investasi ilegal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa advokasi kebijakan literasi finansial memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif investasi bodong. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan, peningkatan akses informasi, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas investasi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan terlindungi dari risiko penipuan investasi.

Kata kunci: *Policy Advocacy, Financial Literacy, Fraudulent Investment.*

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi salah satu permasalahan serius di masyarakat. Modus-modus penipuan ini kerap menargetkan kelompok yang memiliki pemahaman terbatas mengenai literasi finansial, seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi stabilitas ekonomi secara umum (Jelanti et al., 2023).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah laporan terkait investasi bodong terus meningkat setiap tahun. Pada umumnya, pelaku memanfaatkan minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep investasi yang sehat dan legal. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengidentifikasi ciri-ciri investasi ilegal menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka rentan terhadap praktik ini (Radio Republik Indonesia, 2024).

Di sisi lain, upaya advokasi kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial di Indonesia masih menghadapi pelbagai tantangan. Program-program edukasi finansial yang ada belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam penyebaran informasi yang efektif. Hal ini memicu tumbuh suburnya investasi bodong berkedok investasi yang legal dengan komoditas yang sebenarnya tidak berharga (Pede et al., 2023).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan advokasi kebijakan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat (Ernayani et al., 2024). Advokasi ini tidak hanya mencakup edukasi langsung, tetapi juga upaya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan literasi finansial yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengenali ciri-ciri investasi yang aman dan legal, sehingga dapat melindungi diri mereka dari praktik investasi bodong.

Kasus penipuan berkedok investasi bodong telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, pelajar dan mahasiswa mulai menjadi target baru bagi pelaku penipuan ini, terutama melalui *platform digital* yang saat ini begitu lekat dengan masyarakat. Modus yang digunakan seringkali memanfaatkan minimnya pemahaman tentang literasi keuangan masyarakat, dengan menawarkan keuntungan instan tanpa risiko yang jelas.

Generasi muda, khususnya pelajar, memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun, rendahnya literasi finansial di kalangan pelajar menjadi salah satu faktor yang membuat mereka rentan terhadap godaan investasi bodong. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di kalangan generasi muda masih berada pada tingkat yang memprihatinkan, dengan mayoritas belum memahami konsep dasar seperti pengelolaan risiko, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang (Irawan, 2024).

Di sisi lain, upaya literasi finansial yang ditujukan kepada pelajar seringkali belum terintegrasi secara sistemik dalam kurikulum pendidikan. Program edukasi finansial yang ada cenderung sporadis dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan pelajar, terutama di wilayah terpencil. Hal ini diperparah dengan semakin mudahnya akses teknologi yang memungkinkan pelaku investasi bodong menasar generasi muda melalui media sosial dan aplikasi *digital*. Perlu ada keberanian dari pihak pemerintah untuk memasukkan literasi finansial sebagai salah satu bagian dari kurikulum pendidikan yang dapat dimulai sejak jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan pendidikan menengah atas.

Advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar menjadi langkah strategis untuk membekali mereka dengan kemampuan mengenali risiko investasi ilegal sekaligus mengelola keuangan secara bijak (Universitas Gadjah Mada, 2024). Melalui literasi

finansial, pelajar dapat dibekali keterampilan untuk membedakan investasi yang aman dan legal dari modus penipuan. Selain itu, advokasi ini juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif dan melindungi generasi muda dari dampak buruk investasi bodong yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial mereka di masa depan.

Riset ini menggunakan beberapa penelitian yang relevan untuk dikomparasikan sebagai panduan bagi konteks yang tengah dikaji. Salah satu hasil riset yang digunakan sebagai bahan pembandingan adalah penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan yang mengkaji tentang peningkatan literasi finansial berbasis syariah di kalangan mahasiswa untuk mewujudkan generasi ekonomi muslim mandiri. Riset tersebut mengungkap sejumlah dinamika yang terjadi pada generasi muda ketika mereka hendak melakukan investasi yang baik dan benar di era modern (Irawan, 2024). Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Ernayani, Hesty, Dewi, Alfiana dan Mohamad menunjukkan bahwa program-program literasi keuangan telah berhasil meningkatkan tingkat literasi dan kemandirian finansial masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya (Ernayani et al., 2024). Penelitian ini akan mengkaji hal yang serupa dengan penelitian terdahulu yakni, tentang literasi finansial yang dapat ditransmisikan kepada para pelajar dalam konteks advokasi kebijakan publik untuk meningkatkan pemahaman finansial di kalangan pelajar agar terhindar dari investasi bodong. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini, Peneliti akan berfokus di wilayah Papua.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran penting advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar sebagai upaya untuk memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman literasi finansial di kalangan generasi muda. Sehingga, generasi muda yang notabene merupakan generasi penerus bangsa Indonesia dapat terhindar dari belenggu penipuan berkedok investasi bodong.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripti dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan advokasi kebijakan literasi finansial di kalangan pelajar yang ada di wilayah Papua. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang dapat difungsikan guna melihat dan memahami kenyataan yang sudah terjadi dan dialami subjek (Muhammad Iqbal Usman et.al, 2023). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah dengan melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan menentukan kriteria tertentu (*purposive sampling*). Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, verifikasi data dan reduksi data (Huberman & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya literasi finansial di masyarakat menjadi salah satu penyebab utama maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas tentang konsep investasi cenderung mudah terpengaruh oleh janji keuntungan besar yang tidak realistis. Rendahnya kesadaran terhadap ciri-ciri investasi ilegal, seperti tidak adanya izin resmi dan kurangnya transparansi, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan (Tambunan & Hendarsih, 2022). Sehingga, penipuan yang menggunakan kedok investasi begitu mudah untuk masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia di wilayah manapun termasuk tentu saja di wilayah Papua sebagai salah satu wilayah terluar di Republik Indonesia.

Upaya advokasi kebijakan literasi finansial di Indonesia telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya akses ke program edukasi yang terstruktur, terutama di daerah terpencil. Beberapa program yang ada, seperti kampanye publik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan lainnya, sering kali belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, koordinasi antar

lembaga terkait masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya integrasi literasi finansial ke dalam sistem pendidikan formal sebagai langkah strategis. Pendidikan sejak dini dapat membekali individu dengan kemampuan untuk mengenali investasi legal, mengelola risiko, dan membuat keputusan keuangan yang bijak. Kampanye literasi finansial yang melibatkan media sosial juga terbukti memiliki potensi besar dalam menjangkau generasi muda, yang menjadi salah satu kelompok rentan terhadap modus investasi bodong berbasis digital (Kemendikbudristek Republik Indonesia, 2024).

Dalam aspek kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas investasi menjadi elemen penting. Regulasi yang tegas, disertai dengan penegakan hukum yang konsisten, dapat mencegah pelaku investasi bodong beroperasi. Sementara itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan efektivitas advokasi literasi finansial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi kebijakan literasi finansial tidak hanya menjadi alat edukasi, tetapi juga mekanisme pencegahan yang strategis untuk memberantas praktik penipuan investasi bodong. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya memperluas jangkauan program literasi finansial, meningkatkan keterlibatan teknologi dalam kampanye edukasi, serta memperkuat peran lembaga pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas secara finansial dan mampu melindungi diri dari risiko penipuan.

Papua sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia memiliki enam pemerintah provinsi yang salah satu otoritasnya adalah mengatur tentang pendidikan di tingkat dini, dasar, menengah pertama sampai menengah atas. Dari seluruh wilayah yang ada di Papua, Peneliti melihat bahwa literasi finansial bagi para pelajar dan bahkan masyarakat umum sekalipun belum dapat dikatakan baik. Hal itu terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi di salah satu kampus yang ada di Kabupaten Merauke dimana para dosen yang notabene merupakan pihak mencetak (salah satunya) profesi guru, masih dapat dikanggangi oleh penipuan berkedok investasi bodong. Kondisi tersebut menggambarkan betapa peliknya

masalah pemahaman finansial di kalangan para pelajar dan/atau pembelajar di wilayah Papua.

Kondisi tersebut hanya merupakan puncak gunung es yang tidak diketahui seberapa dalam rendahnya pemahaman atau literasi finansial merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah Papua. Untuk itu, perlu ada suatu kebijakan yang diadvokasi oleh para pihak yang memiliki kepedulian terhadap kondisi yang ada agar literasi finansial di wilayah Papua dapat mengalami peningkatan. Hal itu bahkan perlu dilakukan sejak dini, sejak masyarakat ada di jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah atas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siara persnya merilis anjuran untuk mendorong upaya untuk meningkatkan literasi finansial bagi warganegara Indonesia melalui pelbagai program edukasi finansial termasuk diantaranya kepada kelompok-kelompok pelajar yang menjadi sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan sesuai Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024). *Press release* yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia itu kian mengkonfirmasi bahwa penting memberikan pemahaman literasi finansial kepada para pelajar untuk menjadikan mereka sebagai generasi yang kuat secara finansial di masa depan. Sehingga, negara dapat diuntungkan dengan adanya generasi yang tidak mudah untuk tertipu dengan investasi bodong yang kerap menjanjikan keuntungan tanpa adanya kejelasan alur dan/atau proses bisnis.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil riset mengenai advokasi kebijakan literasi finansial dalam rangka memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas penguatan literasi finansial melalui perumusan kebijakan publik di wilayah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia berada dalam taraf yang tengah diformulasikan. Beberapa institusi mulai membangun kesadaran mengenai pentingnya literasi finansial bagi masyarakat dan juga bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Republik

Indonesia. Exposure terhadap keberadaan kebijakan belum mampu dimaksimalkan oleh otoritas pemerintah lokal dan unsur lainnya dalam mengadvokasi suatu kebijakan pada hakikatnya yang dapat diadopsi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di wilayah Papua (Syukron & Mana, 2023).

Strategi dan advokasi kebijakan praktis berupa penerbitan regulasi yang mendukung aktivitas peningkatan literasi finansial di wilayah Papua sangat diperlukan secara spesifik guna memberikan ruang pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar dalam setiap kegiatan finansial di wilayah paling timur di Indonesia. Itu juga dapat menjadi sebuah langkah taktis mengingat eksistensi kebijakan publik merupakan manifestasi dari koridor gagasan yang mengungkap ide-ide penting terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang. Sehingga, dalam konteks advokasi kebijakan literasi finansial memerlukan strategi berupa pelibatan terhadap komunitas-komunitas lokal, *non government organization*, para akademisi dan unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap rendahnya literasi finansial yang juga dituangkan dalam regulasi spesifik mengenai kurikulum yang paling ideal oleh otoritas pemerintahan setempat.

Merujuk pada hasil riset ini maka, ada sejumlah rekomendasi yang dapat diadopsi oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di wilayah Papua. Salah satu rekomendasi yang paling mendasar adalah perlunya setiap otoritas pemerintahan di wilayah Papua untuk mulai merumuskan kebijakan publik dalam rangka untuk meningkatkan literasi finansial sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan di Papua. Selanjutnya, para aktor yang berkepentingan dalam kegiatan pemerintahan dan pendidikan itu juga hendaknya membangun kesadaran kepada setiap elemen yang ada di wilayahnya untuk berperan secara aktif dalam upaya penguatan literasi finansial khususnya kepada para pelajar baik pelajar di tingkat sekolah dasar, menengah pertama sampai dengan pelajar di jenjang pendidikan menengah atas.

Daftar Pustaka

- Ernayani, R., Zulaecha, H. E., Rachmania, D., Alfiana, & Hakim, M. Z. (2024). Edukasi Literasi Keuangan bagi Masyarakat: Membangun Kemandirian Finansial. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1713–1722.
- Huberman, M. M. B., & Saldana, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Irawan, F. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Mahasiswa untuk Mewujudkan Generasi Ekonomi Muslim Mandiri. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 5(2), 91–98.
- Jelanti, D., Fitriyah, & Astuti, R. (2023). Sosialisasi Terhadap Investasi Bodong. *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 258–269.
- Kemendikbudristek Republik Indonesia. (2024). *Pendidikan Literasi Finansial : Panduan Implementasi untuk Satuan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan*. Kemendikbudristek Republik Indonesia.
- Muhammad Iqbal Usman et.al. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Usaha Tani Perkotaan. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.4518>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Siaran Pers: Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pelajar, OJK Gelar Edukasi Keuangan SMA Se-Jaksel*. Press Release OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pentingnya-Literasi-Kuangan-Bagi-Pelajar-OJK-Gelar-Edukasi-Kuangan-SMA-Se-Jaksel.aspx>
- Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2023). Bisnis Berskema Piramida Berkedok Multilevel Marketing (MLM) Menurut Pandangan Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2614–2618.
- Radio Republik Indonesia. (2024). *OJK Ungkap Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Capai Rp139 T*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/keuangan/608956/ojk-ungkap-kerugian-masyarakat-akibat-investasi-bodong-capai-rp139-t>

- Rachman, Adi Maulana. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Indonesia." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 277-288.
- Rachman, Adi Maulana. "Pengaruh Pertumbuhan Asset dan Operating Leverage terhadap Debt to Equity Ratio pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024): 360-367.
- Rachman, Adi Maulana, Romualdus Turu Putra Maro Djanggo, Okto Irianto, and Ni Luh Putu Nita Yulianti. "PENGARUH RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 2 (2024): 287-297.
- Syukron, N., & Mana, F. A. (2023). Strategi Pemberdayaan Kegiatan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(2), 350–361. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108–113. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>
- Universitas Gadjah Mada. (2024). *Membangun Literasi Keuangan Digital: Strategi Efektif untuk Cegah Pinjaman Online dan Dukung SDGs*. Departemen Ekonomika Dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. <https://deb.sv.ugm.ac.id/membangun-literasi-keuangan-digital-strategi-efektif-untuk-cegah-pinjaman-online-dan-dukung-sdgs/>